

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum, struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007. Penatausahaan keuangan daerah mencakup asas umum penatausahaan keuangan, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran serta penatausahaan pendanaan dan tugas pembantuan.

Lingkup penatausahaan pengeluaran diantaranya Penyediaan Dana (SPD), Permintaan Pembayaran (SPP) baik SPP-UP (Uang Persediaan), SPP-GU (Ganti Uang), SPP-TU (Tambahan Uang) maupun SPP-LS (Langsung) baik SPP-LS Gaji dan Tunjangan dan SPP-LS Barang dan Jasa serta Perintah Membayar (SPM) baik SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU maupun SPM-LS Gaji dan tunjangan dan SPM-LS Barang dan Jasa, Pencairan Dana (SP2D) serta pertanggungjawaban penggunaan dana.

Penatausahaan keuangan khususnya prosedur pengajuan dana dan pembuatan laporan yang dilakukan bendahara pengeluaran pada SKPD Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai saat ini masih dilakukan secara manual, yaitu untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) hanya menggunakan microsoft excel. Permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahan dalam pengetikan kode-kode program dan penentuan pagu anggaran dari suatu kegiatan dalam proses pengajuan dana menyebabkan ini perlu diperbaiki kembali, juga kurangnya kontrol penggunaan anggaran sehingga penyerapan anggaran tidak dapat diukur.

Penggunaan sistem informasi diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan pengelolaan keuangan sehingga semua tahapan kegiatan dapat diterjemahkan ke dalam aplikasi secara terintegrasi dengan baik, penulis merasa perlu membuat suatu rancangan sistem informasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 yang berorientasi Obyek dengan *Unified Modelling Language (UML)*. Karena *UML* menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan *UML*, kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, karena belum adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah maka diperoleh suatu rumusan masalah yaitu bagaimana memudahkan pengelolaan keuangan untuk melakukan proses pengelolaan keuangan daerah menjadi mudah dan cepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga agar tidak berkembang masalah dan keterbatasan waktu yang ada maka penulisan ini hanya dibatasi dalam masalah perancangan analisa sistem informasi penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran mengenai pengajuan dana belanja langsung untuk uang persediaan, ganti uang

persediaan dan tambahan uang persediaan pada ruang lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampainnya. Dalam penulisan ini tidak membahas masalah penatausahaan dan pertanggungjawaban mengenai penggunaan anggaran yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan ini, penulis melakukan pengumpulan bahan yang diperlukan untuk menganalisa dari sistem yang sedang berjalan. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Study Laporan

1) Observasi

Dengan melakukan pengamatan langsung dan meninjau langsung terhadap pelaksanaan proses penatausahaan keuangan daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2) Wawancara

Melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan alur permasalahan, wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan penulisan yang mungkin lepas dari pengamatan.

b) Study Kepustakaan

Selain kegiatan observasi dan wawancara dalam pengumpulan data, penulis juga mencari data dan informasi dari perpustakaan dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan tugas akhir ini.

1.5 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah dalam suatu sistem yang terintegrasi sehingga keuangan daerah dapat dikelola secara tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan tugas akhir ini dapat dijelaskan secara terurai dengan baik, maka penulisan ini perlu disusun secara terstruktur dan sistematis. Adapun sistematis penulisan yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan dasar teori / dasar pemikiran dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik proses analisis, perancangan dan implementasi.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisa dari sistem penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penegeluaran yang akan dibangun meliputi analisis sistem, serta hasil dari analisis tersebut.

Bab ini merupakan bab yang membahas perancangan serta pembangunan software aplikasi sistem informasi penatausahaan dan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran. Perancangan dimulai dari perancangan proses dan perancangan basis data.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan implementasi sistem mulai dari perangkat keras, perangkat lunak serta implementasi basis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran guna pencapaian kinerja yang lebih efektif dan efisien.